



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jalan Cenderawasih No. 233 Makassar Telp ☎ (0411) 876223 Fax. 876223 MAKASSAR 90152

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2023 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Keadaan 29 Desember 2023 terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Neraca Saldo
4. Laporan Operasional
5. Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Per 29 Desember 2023 yang meliputi rincian informasi mengenai :
 - a. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - b. Penjelasan Laporan Operasional (LO)
 - c. Penjelasan Neraca

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Makassar, Januari 2024

KEPALA BADAN,

Prof. Dr. MUHAMMAD JUFRI, M.Si., M.Psi.Psikolog
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. 19680202 199403 1 009

KATA PENGANTAR

Dalam rangka melaksanakan Pasal 295 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Disadari bahwa penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2023 Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan ini masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan yang memerlukan masukan dan saran dari berbagai pihak guna penyempurnaannya.

Demikian laporan ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, Januari 2024

KEPALA BADAN,



Prof. Dr. MUHAMMAD JUFRI, M.Si. M.Psi. Psikolog
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. 19680202 199403 1 003

DAFTAR ISI

Pernyataan Tanggaung Jawab	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
A. Laporan Realisasi Anggaran Semester II Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	1
B. Laporan Operasional (LO)	1
C. Neraca Per 31 Desember Tahun 2022	2
D. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	2
E. Catatan Atas Laporan Keuangan Semester II TA. 2022	3
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	4
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	5
Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan BPSDM	6
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan BPSDM	6
2.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Kinerja	9
Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan BPSDM	110
3.1 Laporan Realisasi Anggaran	10
3.1.1 Pendapatan	10
3.1.2 Belanja	10
3.2 Laporan Operasional (LO)	14
3.2.1 Pendapatan (LO)	14
3.2.2 Beban	14
3.3 Neraca	15
3.3.1 Aset	15
3.3.2 Aset Lancar	16
3.3.3 Aset Tetap	17
3.3.4 Aset Lainnya	23
3.3.5 Kewajiban	24
3.3.6 Ekuitas	25
3.4 Pengungkapan Atas Pos Pos Asset dan Kewajiban	26

Bab IV	Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan SKPD ..	27
	A. Struktur Organisasi SKPD	27
	B. Tugas dan Fungsi SKPD	28
	C. Sumber Daya SKPD	28
	D. Visi dan Misi	29
	E. Program dan Kegiatan SKPD	30
Bab V	Penutup	33

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada pemerintah daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun laporan yang terdiri atas :

- A. Laporan Realisasi Anggaran;
- B. Laporan Operasional;
- C. Neraca;
- D. Laporan Perubahan Ekuitas dan
- E. Catatan atas Laporan keuangan.

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya, informasi tersebut berguna bagi pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

B. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai :

- a. Besarnya beban yang harus ditanggung oleh entitas akuntansi
- b. Operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- c. Prediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.
- d. Penurunan ekuitas (bila deficit operasional) dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggung jawabkan.

C. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang di cakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas dana masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa dimasa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos pos :

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus / defisit-LO pada periode bersangkutan

c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya :

1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.
2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Disamping itu suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan Perubahan Ekuitas dalam catatan atas laporan keuangan.

E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal / keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian kejadian penting lainnya.
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- f. Informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk memberikan dan menyajikan laporan pertanggung jawaban sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran,

dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD disusun dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- k. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 73 tahun 2014 tentang Kebijakan akuntansi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.
- l. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 74 tahun 2014 tentang sistem akuntansi pemerintah daerah;
- m. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyusutan Dan Capitalisasi Aset Tetap.
- n. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1565/XI/TAHUN 2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan ini dibagi dalam 5 (lima) bab dengan rincian pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Berisi pendahuluan yang membahas secara umum maksud dan tujuan penyusunan Laporan keuangan, Landasan hukum penyusunan laporan keuangan, Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

BAB II : Berisi Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan yang membahas secara umum tentang indikator target kinerja keuangan yang terdiri dari indikator makro pembangunan dan indikator bidang-bidang pembangunan serta indikator keberhasilan pembangunan.

BAB III : Berisi penjelasan pos-pos laporan keuangan yang membahas secara rinci tentang rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan yang terdiri dari Pendapatan, Belanja, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, dan serta Pengungkapan atas pos-pos Asset dan kewajiban lain-lain.

BAB IV : Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

BAB V : Penutup.

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan.

No	URAIAN	TARGET		HASIL		%	
		KELUARAN	KEUANGAN	KELUARAN	KEUANGAN	KINERJA	KEU
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	PENDAPATAN		1.323.165.800,00		1.324.620.200,00	100,11	100,11
1.	Pendapatan Asli Daerah		1.323.165.800,00		1.324.620.200,00	100,11	100,11
1.1	Pendapatan Retribusi Daerah		1.323.165.800,00		1.324.620.200,00	100,11	100,11
<i>Peringkatan realisasi pendapatan tersebut disebabkan karena pemakaian sewa lahan/gedung diklat serta Retribusi Jasa Umum (RJU) penyelenggaraan kegiatan Pelatihan PKA dan PKP</i>							
B.	BELANJA DAERAH	100,00	28.344.480.835,00	99,12	27.529.888.473,00	99,12	97,12
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100,00	28.623.197.135,00	99,68	28.084.687.804,00	99,68	97,98
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	805.970.800,00	100,00	745.660.963,00	100,00	92,52
<i>Masukan</i>		<i>Dana yang terselenggara/digunakan sebesar Rp. 745.660.963</i>					
<i>Keluaran</i>		<i>Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja</i>					
<i>Hasil</i>		<i>Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja</i>					
<i>Sumber Pendanaan</i>		<i>Pendapatan Asli Daerah</i>					
<i>Lokasi</i>		<i>Kota Makassar</i>					
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	668.755.100,00	4 Dokumen	610.660.983,00	100,00	91,31
<i>Sisa anggaran tersebut merupakan efisiensi pembayaran kertas cover kegiatan, pembayaran tenaga narasumber yang berada pada internal BPSDM serta biaya perjalanan dinas yang tidak tercapai</i>							
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.200.000,00	1 Dokumen	15.200.000,00	100,00	100,00
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.200.000,00	1 Dokumen	15.200.000,00	100,00	100,00
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	15.200.000,00	1 Dokumen	15.200.000,00	100,00	100,00
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15.200.000,00	1 Dokumen	15.200.000,00	100,00	100,00
1.1.6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	76.415.700,00	10 Laporan	74.200.900,00	100,00	97,10
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	22.173.682.613,00	100,00	21.965.915.622,00	100,00	99,06
<i>Masukan</i>		<i>Dana yang terselenggara/digunakan sebesar Rp. 21.965.915.622</i>					
<i>Keluaran</i>		<i>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>					
<i>Hasil</i>		<i>Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>					
<i>Sumber Pendanaan</i>		<i>Pendapatan Asli Daerah</i>					
<i>Lokasi</i>		<i>Kota Makassar</i>					
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	134 Orang	21.876.222.213,00	134 Orang	21.695.328.778,00	100,00	99,17
<i>Behasarnya dari total realisasi tersebut terdapat realisasi pembayaran utang TPP Bulan Desember Tahun 2022 sebesar Rp. 762.226.082,-</i>							
1.2.2	Pelaksanaan Penetuzahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	245.187.000,00	12 Dokumen	223.946.738,00	100,00	91,34
<i>sisa anggaran tersebut merupakan efisiensi satuan biaya perjalanan dinas yang tidak tercapai</i>							
1.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	17.309.200,00	12 Dokumen	15.443.067,00	100,00	89,22
<i>sisa anggaran tersebut merupakan efisiensi satuan biaya kertas cover kegiatan</i>							
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	13.517.800,00	12 Laporan	13.404.068,00	100,00	99,16
1.2.5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Laporan	6.517.600,00	2 Laporan	5.306.505,00	100,00	81,42
<i>Sisa anggaran tersebut merupakan efisiensi satuan biaya cetak</i>							
1.2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	12.273.000,00	4 Laporan	9.686.135,00	100,00	78,92
<i>Sisa anggaran tersebut merupakan efisiensi satuan biaya cetak</i>							
1.2.7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Laporan	2.855.800,00	2 Laporan	2.800.300,00	100,00	98,06

No	URAIAN	TARGET		HASIL		%	
		KELUARAN	KEUANGAN	KELUARAN	KEUANGAN	RUMERJA	KEJU
1	2	3		4		6	7
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	125.312.000,00	100,00	123.057.650,00	100,00	98,20
	Masukan	Dana yang tersedia/digunakan sebesar Rp. 123.057.650					
	Keluaran	Persentase Administrasi Kepegawaian PD 100%					
	Hasil	Tersedianya Administrasi Kepegawaian PD 100%					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah					
	Lokasi	Kota Makassar					
1.3.2	Panduan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	125.312.000,00	12 Dokumen	123.057.650,00	100,00	98,20
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	639.517.768,00	93,74	545.654.513,00	93,74	85,32
	Masukan	Dana yang tersedia/digunakan sebesar Rp. 545.654.513					
	Keluaran	Persentase Administrasi Umum PD					
	Hasil	Tersedianya Administrasi Umum PD					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah					
	Lokasi	Kota Makassar					
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	11.397.800,00	12 Paket	11.390.308,00	100,00	99,94
1.4.2	Penyediaan Perakitan dan Perlengkapan Kantor (Barang dan jasa dan Belanja Modal)	24 Paket	330.480.208,00	24 Paket	297.723.275,00	100,00	90,09
	sisa anggaran tersebut merupakan biaya sewa kendaraan yang tidak leproses pencairan di BKAD						
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8 Paket	20.955.000,00	8 Paket	20.785.000,00	100,00	99,00
1.4.4	Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	63.821.760,00	12 Laporan	62.993.115,00	100,00	98,70
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	212.983.200,00	9 Laporan	152.782.795,00	81,20	71,76
	sisa anggaran tersebut merupakan efisiensi selain biaya perjalanan dinas yang tidak terpakai						
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0,00		0,00	0,00	0
	Masukan	Dana yang tersedia/digunakan sebesar Rp. 0					
	Keluaran	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan 0%					
	Hasil	Tersedianya Pengadaan BMD Penunjang Urusan 0%					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah					
	Lokasi	Kota Makassar					
1.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		0,00		0,00	0,00	0,00
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	2.345.083.134,00	100,00	2.345.083.334,00	100,00	95,70
	Masukan	Dana yang tersedia/digunakan sebesar Rp. 2.345.083.334					
	Keluaran	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD					
	Hasil	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah					
	Lokasi	Kota Makassar					
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	860.320.167,00	12 Laporan	793.747.966,00	100,00	92,26
	sisa anggaran tersebut merupakan efisiensi selain biaya pembayaran air yang tidak terpakai						
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayaran Umum Kantor	12 Laporan	1.590.247.967,00	12 Laporan	1.551.345.388,00	100,00	97,56
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	427.945.820,00	89,33	369.305.702,00	89,33	83,96
	Masukan	Dana yang tersedia/digunakan sebesar Rp. 369.305.702					
	Keluaran	Jumlah Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD 13 unit					
	Hasil	Tersedianya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD 13 unit					
	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah					
	Lokasi	Kota Makassar					
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13 Unit	257.493.800,00	13 Unit	245.824.500,00	100,00	95,47
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	72.352.020,00	2 Unit	39.115.600,00	60,56	54,06
	sisa anggaran tersebut merupakan efisiensi pembelian pelumas dan pajak kendaraan dinas operasional						
1.7.3	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	1 Unit	25.000.000,00	1 Unit	6.000.000,00	31,50	24,00
	sisa anggaran tersebut merupakan sisa lebih belanja jasa aplikasi yang tidak terpakai						
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	0,00		0,00	0,00	0,00
1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20 Unit	73.100.000,00	20 Unit	68.364.800,00	100,00	93,52
	sisa anggaran tersebut merupakan efisiensi pembayaran jasa pengelolaan sampah						

2.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	100,00	1.721.283.700,00	90,56	1.444.200.669,00	90,56	83,90
2.1	Pengembangan Kompetensi Teknis		401.552.500,00		296.052.555,00	81,89	73,73
	<i>Masukan</i>	<i>Dana yang direalisasikan/digunakan sebesar Rp. 296.052.555</i>					
	<i>Keluaran</i>	<i>Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis 159 orang</i>					
	<i>Hasil</i>	<i>Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis 100%</i>					
	<i>Sumber Pendanaan</i>	<i>Pendapatan Asli Daerah</i>					
	<i>Lokasi</i>	<i>Kota Makassar</i>					
2.1.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan : Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1070 Orang	374.883.100,00	1020 Orang	273.410.680,00	81,43	72,93
	<i>Sisa anggaran tersebut merupakan sisa sebagian SPD yang tidak terbit serta efisiensi anggaran perjalanan dinas</i>						
2.1.2	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan ; Pengembangan Kompetensi Teknis umum, inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	26.669.400,00	1 Dokumen	22.641.875,00	88,40	84,90
	<i>Sisa anggaran tersebut merupakan efisiensi satuan biaya perjalanan dinas yang tidak terpakai.</i>						
2.2	Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100,00	1.319.731.200,00	93,19	1.148.148.114,00	93,19	87,00
	<i>Masukan</i>	<i>Dana yang direalisasikan/digunakan sebesar Rp. 1.148.148.114</i>					
	<i>Keluaran</i>	<i>Jumlah Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi</i>					
	<i>Hasil</i>	<i>Terlaksananya Persentase Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi</i>					
	<i>Sumber Pendanaan</i>	<i>Pendapatan Asli Daerah</i>					
	<i>Lokasi</i>	<i>Kota Makassar</i>					
2.2.1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	30 Orang	0,00		0,00	0,00	100
2.2.2	Peleaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	1 Dokumen	88.155.500,00	1 Dokumen	67.111.020,00	83,26	76,13
	<i>Sisa anggaran tersebut merupakan efisiensi satuan biaya perjalanan dinas yang tidak terpakai.</i>						
2.2.3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	430 Orang	1.210.446.100,00	390 Orang	1.062.279.094,00	80,90	87,76
	<i>sisa anggaran tersebut merupakan sisa sebagian SPD yang tidak terbit serta efisiensi anggaran perjalanan dinas</i>						
2.2.4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Dokumen	21.135.600,00	1 Dokumen	18.758.000,00	94,25	88,75

2.2. Hambatan dan kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Kinerja

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 pada Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan sesuai rencana, namun dalam proses pelaksanaannya terdapat berbagai kendala yang dihadapi antara lain :

1. Belum optimalnya penerapan Surat Edaran Gubernur nomor 800/5767/BPSDM tgl 20 Juni 2022 tentang pengelolaan pendidikan dan pelatihan sistem satu pintu di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Belum terpenuhinya mandatory spending 0,34 % khusus untuk anggaran Pengembangan Kompetensi ASN.
3. Masih Perlu ada penguatan dalam mengidentifikasi anggaran Pendidikan dan Pelatihan yang masih terdapat pada Dokumen Perencanaan Anggaran Perangkat Daerah yang seharusnya melekat pada BPSDM sebagai penyelenggaraan dan Penjamin Mutu Pengembangan Kompetensi ASN, Sehingga terpenuhi Hak dan Kesempatan ASN dalam memperoleh Pengembangan Kompetensi sebanyak minimal 20 Jam Pelajaran per tahun sesuai amanat PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Perlan No. 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

3.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

3.1.1 Pendapatan

Tahun 2023		2022
Rencana	Realisasi	Realisasi
1.323.176.200	1.324.620.200	881.540.934

Dalam Tahun Anggaran 2023 Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan disamping mengelola anggaran belanja, juga mengelola anggaran pendapatan yang bersumber dari penerimaan Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp.1.323.176.200,- dengan realisasi sampai bulan Desember 2023 sebesar Rp.1.324.620.200,- atau 100,11% dan tepat penurunan anggaran sebesar Rp.117.848.066,- yang terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Rencana	Realisasi	%	Realisasi
1	Retribusi Jasa Umum	680.000.000	680.000.000	100,00	-
2	Retribusi Jasa Usaha	643.176.200	644.620.200	100,22	881.540.934
	Jumlah	1.323.176.200	1.324.620.200	100,11	881.540.934

3.1.2 Belanja

Tahun 2023		Tahun 2022
Rencana	Realisasi	Realisasi
28.344.480.835,00	27.528.888.473,00	29.569.380.007,00

Pada Tahun Anggaran 2023 Belanja Daerah Badan Pengembangan SDM, direncanakan sebesar Rp.28.344.480.835,00,- dapat direalisasikan sebesar Rp.27.528.888.473,- atau 97,12%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp.815.592.362,-. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.2.040.491.534,- atau 6.90% dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.29.569.380.007,00- Informasi tentang rincian dan penjelasan pos Belanja Daerah yang terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Rencana	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Operasional	28.344.480.835.00	27.528.888.473.00	97.12	28.516.322.407.00
2	Belanja Modal	-	-	-	1.053.057.600.00
	Jumlah	28.344.480.835.00	27.528.888.473.00	97.12	29.569.380.007.00

3.1.2.1. Belanja Operasional

Tahun 2023		Tahun 2022
Rencana	Realisasi	Realisasi
28,344,480,835.00	27,528,888,473.00	28,516,322,407.00

Belanja Operasional direncanakan sebesar Rp.28.344.480.835,- dapat direalisasikan sebesar Rp.27.528.888.473,- atau 97.12% terdapat sisa anggaran sebesar Rp.815.592.362,-. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.987.433.934,- atau 3,46% dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.28.516.322.407,-. Adapun rincian dan penjelasan tentang Belanja Operasional terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Rencana	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Pegawai	21.876.222.213	21.695.328.778,00	99,17	19.981.783.861,00
2	Belanja Barang dan Jasa	6.468.258.622	5.833.559.695,00	90,19	8.534.538.546,00
	Jumlah	28.344.480.835	27.528.888.473,00	97,12	28.516.322.407,00

a. Belanja Pegawai

Tahun 2023		Tahun 2022
Rencana	Realisasi	Realisasi
21.876.222.213,00	21.695.328.778	19.981.783.861

Belanja Pegawai direncana sebesar Rp.21.876.222.213,- dapat direalisasi sebesar Rp.21.695.328.778,- atau 99,17% dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp.180.893.435,-. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp.1.713.544.917,- atau 8,58% dari realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 19.981.783.861,- dengan rincian dan penjelasan pos belanja pegawai terbagi atas :

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 202
		Rencana	Realisasi	%	Realisasi
1	Gaji dan Tunjangan	10.667.494.649	10.602.374.567	99,39	11.463.605.135
2	Tambahan Penghasilan	11.208.727.564	11.092.954.211	98,97	8.518.178.726
	Jumlah	21.876.222.213	21.695.328.778	99,17	19.981.783.861

b. Belanja Barang dan Jasa

Tahun 2023		Tahun 2022
Rencana	Realisasi	Realisasi
6.468.258.622	5.833.559.695,00	8.534.538.546,00

Dalam tahun anggaran 2023 Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan telah menganggarkan untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.6.468.258.622,- dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah direalisasikan sebesar Rp.5.833.559.695,- atau mencapai sekitar 90,19%.

Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.2.700.978.851,- atau 31,65% dari realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp.8.534.538.546,- yang terdiri dari :

No	Uraian	Realisasi	
		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Belanja Barang	1.200.983.920,00	1.840.935.473,00
2	Belanja Jasa	3.622.365.834,00	4.221.107.693,00
3	Belanja pemeliharaan	59.340.602,00	487.064.814,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	950.869.339,00	1.985.430.566,00
Jumlah		5.833.559.695,00	8.534.538.546,00

3.1.2.2 Belanja Modal

Tahun 2023		Tahun 2022
Rencana	Realisasi	Realisasi
-	-	1.053.057.600,00

Badan Pengembangan SDM dalam Tahun Anggaran 2023 tidak tersedia anggaran belanja modal sehingga tidak mengalami perbandingan realisasi tahun 2023 dan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp.1.053.057.600,-. Adapun rincian realisasi belanja modal dapat dilihat sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi	
		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	-	290.945.320
2	Gedung dan Bangunan	-	552.333.380,00
3	Aset Tetap Lainnya	-	209.778.900
4	Belanja Aset Lainnya	-	-
Jumlah		-	1.053.057.600

1) Peralatan dan Mesin

Tahun 2023		Tahun 2022
Rencana	Realisasi	Realisasi
-	-	290.945.320

Belanja Peralatan dan Mesin tidak tersedia anggaran belanja peralatan dan mesin sehingga tidak mengalami perbandingan realisasi tahun 2023 dan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 290.945.320,-. Adapun Rincian belanja Peralatan dan mesin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi	
		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	92.713.000
2	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	-	14.396.700
3	Belanja Modal Pengadaan Komputer	-	183.835.620
Jumlah		-	290.945.320

2) Gedung dan Bangunan

Tahun 2023		Tahun 2022
Rencana	Realisasi	Realisasi
-	-	552,333,380.00

Belanja Gedung dan Bangunan tidak tersedia sehingga tidak mengalami perbandingan realisasi tahun 2023 dan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 552.333.380-. Adapun Rincian belanja gedung dan bangunan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi	
		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	552.333.380
Jumlah		-	552.333.380

3) Aset Tetap Lainnya

Tahun 2023		Tahun 2022
Rencana	Realisasi	Realisasi
-	-	209.778.900,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tidak tersedia sehingga tidak mengalami perbandingan realisasi tahun 2023 dan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 209.778.900-. Adapun Rincian belanja Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi	
		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	-	-
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	209.778.900
Jumlah		-	209.778.900

3.2. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

3.2.1. Pendapatan – LO

Tahun 2023	Tahun 2022
1.322.723.500	884.660.934

Pada Tahun Anggaran 2023 pendapatan diterima dimuka sebanyak 6 bulan x @Rp.1.500.000,- sebesar Rp. 9.000.000,- sehingga Pendapatan Daerah – LO bersaldo sebesar Rp.1.322.723.500,-. Dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp.884.660.934,- Pendapatan – LO terdapat selisih peningkatan sebesar Rp.439.959.266,- atau 49,52%. Adapun rincian pendapatan sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Selisih (Rp)	%
1	Pendapatan Retribusi Daerah	1.322.723.500	884.660.934	438.062.566	49,52
2	Pendapatan Hiba	-	-	-	0,00
	Jumlah	1.322.723.500	884.660.934	438.062.566	49,52

3.2.2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam masa pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau ekonomi aset atau timbulnya kewajiban.

3.2.2.1. Beban Operasional

Saldo Beban Operasional Badan Pengembangan SDM Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.29.696.464.588,73. Beban tersebut mengalami penurunan sebesar 2,02% dari Beban Tahun 2022 sebesar Rp. 30.308.834.432,03. Beban operasional terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Selisih (Rp)	%
1	Beban Pegawai	21.814.776.675,00	20.082.590.825,00	1.732.185.850,00	8,63
2	Beban Barang dan Jasa	7.180.463.365,41	8.627.372.503,00	(1.446.909.137,59)	-16,77
3	Beban Penyisihan Piutang	-	1.223.300,00	(1.223.300,00)	-100,00
4	Beban Penyusutan	1.364.660.326,98	1.597.647.804,03	(232.987.477,05)	-14,58
	Jumlah	30.359.900.367,39	30.308.834.432,03	51.065.935,36	0,17

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai pada Badan Pengembangan SDM TA. 2023 sebesar Rp.21.814.776.675,- Beban tersebut mengalami peningkatan 8,63% dari Beban Tahun 2022 sebesar Rp. 20.082.590.825,-. Adapun rincian Beban pegawai terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Selisih (Rp)	%
1	Gaji & Tunjangan	10,602,374,567	11,470,376,019	(868,001,452)	-7.57
2	Tambahan Penghasilan PNS	11,212,402,108	8,612,214,806	2,600,187,302	30.19
	Jumlah	21,814,776,675	20,082,590,825	1,732,185,850	8.63

b. Beban Barang dan Jasa

Beban jasa merupakan nilai beban jasa periode T.A. 2023 sebesar Rp.7.180.463.365,41. Beban tersebut mengalami penurunan 16,77% dari Beban Tahun 2022 sebesar Rp.8.627.372.503,-. Adapun rincian Beban Jasa terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Selisih (Rp)	%
1	Beban Bahan/Barang	2.091.411.766,00	1.841.618.232	249.793.534,00	13,56
1	Beban Jasa	3.713.903.922,00	4.292.921.677	(579.017.755,00)	-13,49
2	Beban Pemeliharaan	332.556.728,41	507.402.028	(174.845.299,59)	-34
3	Beban Perjalanan Dinas	1.042.590.949,00	1.985.430.566	(942.839.617,00)	-47
	Jumlah	7.180.463.365,41	8.627.372.503	(1.446.909.137,59)	-16,77

c. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan merupakan nilai beban penyusutan periode TA. 2023 sebesar Rp. 1.364.660.326,98,- beban tersebut mengalami penurunan 14,58% dari Beban Penyusutan Tahun 2022 sebesar Rp. 1.597.647.804,03. Adapun rincian Beban Penyusutan sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Selisih (Rp)	%
1	Akumulasi Penyusutan Aset tetap	1,364,660,326.98	1,597,647,804.03	(232,987,477)	-14.58
	Jumlah	1,364,660,326.98	1,597,647,804.03	(232,987,477)	-14.58

3.3. NERACA

Neraca untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu.

3.3.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,

termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya, yang terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Aset Lancar	3.806.482,00	5.937.927,00
2	Aset Tetap	37.988.081.515,60	40.275.542.162,86
3	Aset Lainnya	156.709.800,00	204.797.139,06
	Jumlah	38.148.597.797,60	40.486.277.228,92

3.3.2. Aset Lancar

Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, piutang lainnya, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, piutang lainnya dan persediaan. Nilai Aset Lancar Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.3.806.482,- dan Rp.5.170.200,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
2	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
3	Persediaan	3.806.482	5.170.200
	Jumlah	3.806.482	5.170.200

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

• Sisa dana yang tidak terpakai	Rp.	0,00
• Pajak yang masih tertinggal di Bendahara Pengeluaran	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	0,00

b. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan yang belum disetor per 31 Desember 2023 terdiri dari :

• Sisa dana yang tidak terpakai	Rp.	0,00
• Pajak yang masih tertinggal di Bendahara Penerimaan	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	0,00

c. Persediaan

Persediaan yang masih tersisa per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

• Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp.	1.176.600,00
• Kertas dan Cover	Rp.	664.000,00
• Perabot Kantor	Rp.	1.462.487,00

• Alat Listrik	Rp.	503.395,00
Jumlah	Rp.	3.806.482,00

3.3.3. Aset Tetap

Tahun 2023	Tahun 2022
37.988.081.515,60	40.275.542.162,86

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 37.988.081.515,60,- dan 2022 sebesar sebesar Rp. 40.094.735.148,67,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo Awal 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)	Realisasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Tanah	19.535.750.000,00	(750.000.000,00)	-	18.785.750.000,00
2	Peralatan dan Mesin	17.282.905.947,00	(892.188.500,00)	-	16.390.717.447,00
3	Gedung dan Bangunan	23.850.704.020,38	(181.264.600,00)	-	23.669.439.420,38
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	385.845.328,36	-	-	385.845.328,36
5	Aset tetap lainnya	162.907.985,00	-	-	162.907.985,00
6	Akumulasi Penyusutan	(21.123.378.132,07)	(283.200.533,07)	-	(21.406.578.665,14)
	Jumlah	40.094.735.148,67	(2.106.853.633,07)	-	37.988.081.515,60

Rincian Aset Tetap dapat dilihat pada lampiran Daftar Aset Tetap BPSDM Tahun 2023.

1. Tanah

Tanah Kantor

Tanah Kantor Merupakan nilai tanah kantor per 31 Desember 2023 yang terdiri :

Saldo Awal 1 Januari 2023	19,535,750,000.00
Mutasi Keluar ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov.SulSel	(750,000,000.00)
Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2023	-
Jumlah	18,785,750,000.00

Berdasarkan Berita Acara Pengalihan Status Penggunaan Dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sul Sel Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov.SulSel No. 012/519/BPSDM tanggal 3 MEI 2023.

2. Peralatan dan Mesin

Merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp.16.390.717.447,- dan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 17.282.905.947,- yang terdiri dari :

No	Uraian	Saldo Awal 2023 (Rp)	+ / (-) (Rp)	Realisasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Alat Berat	94.546.960	-	-	94.546.960
2	Alat-alat angkutan	2.368.786.820	(892.188.500)	-	1.476.598.320
3	Alat Bengkel	14.400.000	-	-	14.400.000
4	Alat Pertanian dan Peternakan	2.750.000	-	-	2.750.000
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	11.268.910.493	-	-	11.268.910.493
6	Alat Studio dan Komunikasi	726.895.464	-	-	726.895.464
7	Alat-alat Kedokteran	22.862.500	-	-	22.862.500
8	Alat Laboratorium	160.939.470	-	-	160.939.470
9	Alat Keamanan	-	-	-	-
10	Komputer	2.617.864.240	-	-	2.617.864.240
11	Rambu-rambu	4.950.000	-	-	4.950.000
	Jumlah	17.282.905.947	(892.188.500)	-	16.390.717.447

Rincian aset peralatan dan mesin dapat dilihat pada lampiran Daftar Aset Tetap BPSDM Tahun 2023.

1) Alat Besar

Alat besar merupakan nilai alat besar per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp	94.546.960,00
Realisasi Belanja Modal TA. 2023	Rp	-
Jumlah	Rp	94.546.960,00

2) Alat Angkutan

Alat angkutan merupakan nilai alat angkutan per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp	2.368.786.820,00
Realisasi Belanja Modal TA. 2023	-Rp	892.188.500,00
Jumlah	Rp	1.476.598.320,00

3) Alat Bengkel dan Alat Ukur

Alat-alat Bengkel dan alat ukur Merupakan nilai Alat bengkel dan alat ukur per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp.	14.400.000,00
Realisasi Belanja Modal TA. 2023	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	14.400.000,00

4) Alat Pertanian

Alat Pertanian merupakan nilai Alat Pertanian per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp.	2.750.000,00
Realisasi Belanja Modal T.A. 2023	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	2.750.000,00

5) Alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat Kantor dan Rumah Tangga merupakan nilai alat kantor dan rumah tangga per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp	11,268,910,493.00
Realisasi Belanja Modal TA. 2023	Rp	-
Jumlah	Rp	11,268,910,493.00

6) Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

Alat Studi, Komunikasi dan pemancar merupakan nilai alat studio, komunikasi dan pemancar per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp	726,895,464.00
Realisasi Belanja Modal TA. 2023	Rp	-
Jumlah	Rp	726,895,464.00

7) Alat Kedokteran dan Kesehatan

Alat Kedokteran dan Kesehatan merupakan nilai alat kedokteran dan kesehatan per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp	22,862,500.00
Realisasi Belanja Modal TA. 2023	Rp	-
Jumlah	Rp	22,862,500.00

8) Alat Laboratorium

Alat Laboratorium merupakan nilai alat laboratorium per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp	160,939,470.00
Realisasi Belanja Modal TA. 2023	Rp	-
Jumlah	Rp	160,939,470.00

9) Komputer

Alat komputer merupakan nilai peralatan komputer per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp	2,617,864,240.00
Realisasi Belanja Modal TA. 2023	Rp	-
Jumlah	Rp	2,617,864,240.00

10) Rabu-rabu

Alat rabu-rabu merupakan nilai rabu-rabu per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp	4,950,000.00
Realisasi Belanja Modal TA. 2023	Rp	-
Jumlah	Rp	4,950,000.00

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan gedung merupakan nilai gedung dan bangunan gedung per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

No	Uraian	Saldo Awal 2023 (Rp)	+ / (-) (Rp)	Realisasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Bangunan Gedung	23,625,706,720.38	(181,264,600)	-	23,444,442,120.38
2	Monumen	-	-	-	-
3	Tugu Titik Kontrol/Pasti	224,997,300.00	-	-	224,997,300.00
	Jumlah	23,850,704,020.38	(181,264,600)	-	23,669,439,420.38

Rincian aset Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada Lampiran Daftar Aset Tetap BPSDM Tahun 2023.

1) Bangunan Gedung

Bagunan gedung merupakan nilai baguna gedung per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp	23.625.706.720,38
Realisasi Belanja Modal Tahun 2023	Rp	-
Mutasi Aset	Rp	(181.264.600,00)
Jumlah	Rp	23.444.442.120,38

Berdasarkan Berita Acara Pengalihan Status Penggunaan Dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sul Sel Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov.SulSel No. 012/519/BPSDM tanggal 3 MEI 2023.

2) Monumen

Monumen merupakan nilai monumen per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp	-
Realisasi Belanja Modal Tahun 2023	Rp	-
Jumlah	Rp	-

3) Tugu Titik Kontrol/Pasti

Tugu titik kontrol/pasti merupakan nilai tugu titik kontrol/pasti per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp	224.997.300,00
Realisasi Belanja Modal Tahun 2023	Rp	-
Jumlah	Rp	224.997.300,00

4. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Jalan, Jaringan dan Irigasi merupakan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

No	Uraian	Saldo Awal 2023 (Rp)	+ / (-) (Rp)	Realisasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	117.990.328,36	-	-	117.990.328,36
2	Bagunan Air (Irigasi)	19.849.000,00	-	-	19.849.000,00
3	Instalasi	65.700.000,00	-	-	65.700.000,00
4	Jaringan	182.306.000,00	-	-	182.306.000,00
	Jumlah	385.845.328,36	-	-	385.845.328,36

Rincian aset Jalan, jaringan dan irigasi dapat dilihat pada Lampiran Daftar Aset Tetap BPSDM Tahun 2023.

Jalan dan Jembatan

Jalan dan jembatan merupakan nilai penyesuaian aset atas kapitalisasi dari belanja barang dan jasa (pemeliharaan) per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

• Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp.	117.990.328,36
• Realisasi Belanja Modal TA. 2023	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah	Rp.	117.990.328,36

Bangunan Air (Irigasi)

Bangunan Air (Irigasi) Merupakan nilai Bangunan Air per 31 Desember 2023 yang terdiri :

• Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp.	19.849.000,00
• Realisasi Belanja Modal TA. 2023	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah	Rp.	19.849.000,00

Instalasi

Instalasi Merupakan nilai Instalasi per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp.	65.700.000,00
Reklasifikasi	Rp.	0,00
Realisasi Belanja Modal TA. 2023	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah	Rp.	65.700.000,00

Jaringan

Jaringan Merupakan nilai Jaringan per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp.	182.306.000,00
Realisasi Belanja Modal TA. 2023	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah	Rp.	182.306.000,00

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya merupakan nilai perolehan aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

No	Uraian	Saldo Awal 2023 (Rp)	+ / (-) (Rp)	Realisasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Buku dan Perpustakaan	146.652.985	-	-	146.652.985
2	Barang bercorak kesenian/ Kebudayaan	16.255.000	-	-	16.255.000
	Jumlah	162.907.985,00	-	-	162.907.985

Rincian aset tetap lainnya dapat dilihat pada Lampiran Daftar Aset Tetap BPSDM Tahun 2023.

• Buku dan Perpustakaan

Buku dan Perpustakaan Merupakan nilai Buku dan Perpustakaan per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp.	146.652.985,00
Realisasi Belanja Modal TA. 2023	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah	Rp.	146.652.985,00

• Barang bercorak Kesenian/Kebudayaan

Barang bercorak Kesenian/Kebudayaan Merupakan nilai Barang yang bercorak Seni per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp.	16.255.000,00
Realisasi Belanja Modal TA. 2023	Rp	0,00
Jumlah	Rp.	16.255.000,00

6. Akumulasi Penyusutan Aset tetap

Tahun 2023	Tahun 2022
(21,406,578,665.14)	(21,123,378,132.07)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penyusutan nilai aset tetap sebagai dasar Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap serta Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nilai akumulasi penyusutan aset tetap Per 31 Desember 2023 sebesar Rp.21.406.578.665,14 terdiri dari :

No	Uraian	Saldo Awal 2023 (Rp)	Penyusutan +(-) (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(15,266,314,985.07)	58,442,699.99	(15,207,872,285.08)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(5,572,531,230.25)	(329,396,289.73)	(5,901,927,519.98)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(265,488,666.70)	(10,299,943.33)	(275,788,610.03)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(19,043,250.05)	(1,947,000.00)	(20,990,250.05)
	Jumlah	(21,123,378,132.07)	(283,200,533.07)	(21,406,578,665.14)

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dapat dilihat pada Lampiran Daftar Aset Tetap BPSDM Tahun 2023.

1) Penyusutan Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin merupakan nilai Penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp	(15,266,314,985.07)
Penyusutan Tahun 2023	Rp	58,442,699.99
Jumlah	Rp	(15,207,872,285.08)

2) Penyusutan gedung dan bangunan

Gedung dan Bangunan merupakan nilai penyusutan gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp	(5.572.531.230,25)
Penyusutan Tahun 2023	Rp	(329.396.289,73)
Jumlah	Rp	(5.901.927.519,98)

3) Penyusutan jalan, irigasi dan jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan nilai Penyusutan jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp	(265,488,666.70)
Penyusutan Tahun 2023	Rp	(10,299,943.33)
Jumlah	Rp	(275,788,610.03)

4) Penyusutan aset tetap lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan nilai Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp	(19,043,250.05)
Penyusutan Tahun 2023	Rp	(1,947,000.00)
Jumlah	Rp	(20,990,250.05)

3.3.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan nilai aset lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp.156.709.800,- dan 31 Desember 2022 sebesar Rp.209.154.525,- adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo Awal 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	840,383,400.00	-	840,383,400.00
2	Aset Lain-lain	-	747,700,000.00	747,700,000.00
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(631,228,875.00)	(52,444,725.00)	(683,673,600.00)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	(747,700,000.00)	(747,700,000.00)
Jumlah		209,154,525.00	(52,444,725.00)	156,709,800.00

Aset tak Berwujud

• Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp.	840.383.400,00
• Realisasi Belanja Modal TA. 2023	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	840.383.400,00

Aset Lain-Lain

• Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp.	0,00
• Reklasifikasi Aset TA. 2023	Rp.	747.700.900,00
Jumlah	Rp.	840.383.400,00

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

• Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp.	(631.228.875,00)
• Realisasi Belanja Modal TA. 2023	Rp.	(52.444.725,00)
Jumlah	Rp.	(683.673.260,94)

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

• Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp.	0,00
• Penghapusan Aset TA. 2023	Rp.	(635.586.260,94)
Jumlah	Rp.	(635.586.260,94)

3.3.5. Kewajiban

A. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan Penilaian Utang dengan menggunakan nilai nominal yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo. Kewajiban jangka pendek dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek :

Utang Beban

Utang Beban merupakan nilai utang beban per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

Pendapatan Diterima Dimuka	Rp.	9.000.000,00
Utang Beban	Rp.	2.350.042.519,41
Jumlah	Rp.	2.359.042.519,41

B. Utan Jangka Pendek Lainnya

Pajak yang belum disetor di Kas Negara per 31 Desember 2023 sebesar Rp. NIHIL

3.3.6. Ekuitas

Tahun 2023	Tahun 2022
10,380,236,536.28	15,648,871,492.77

Ekuitas Dana merupakan pos Neraca Pemerintah yang menumpang selisih antara asset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Ekuitas - LPE

Ekuitas merupakan nilai ekuitas per 31 Desember 2023 yang terdiri dari :

Saldo Awal Januari 2023	Rp	15,648,871,492.77
Surplus/Defisit-LO	Rp	(29,037,176,867.39)
Rekening Konsolidasi	Rp	23,768,541,910.90
Koreksi asset tetap	Rp	-
Koreksi Hutan	Rp	-
Jumlah Ekuitas - LPE	Rp	10,380,236,536.28

RK PPKD

Saldo awal Januari 2023	Rp	23,768,541,910.90
Penerimaan RK PPKD		
- SPD2D - LS	Rp	24,886,370,725.00
- SPD2D - UPI/GU/TU	Rp	2,807,158,902.00
Jumlah Penerimaan RK PPKD	Rp	27,693,529,627.00

Pengeluaran RK PPKD

- Penerimaan Setoran		
Pendapatan SKPD	Rp	(1,324,620,200.00)
- Pengembalian Sisa Kas	Rp	(147,319,654.00)
- Setoran Pengembalian	Rp	(17,321,500.00)
- Mutasi Aset ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Sulsel	Rp	(794,949,531.09)
Jumlah Pengeluaran RK PPKD	Rp	(2,284,210,885.09)
Jumlah RK PPKD	Rp	25,409,318,741.91
Jumlah Ekuitas	Rp	35,789,555,278.19
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	Rp	38,148,597,797.60

3.4. Pengungkapan Atas Pos Pos Asset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja Serta Rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

3.4.1. Utang beban

Utang beban timbul sehubungan dengan penerapan basis akruaI atas belanja periode Desember 2023 yang terdiri dari :

No.	Jenis Utang	Saldo	Keterangan
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	884,549,546.00	
2	Tagihan Air	3,279,600.00	
3	Tagihan Listrik	54,573,609.00	
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor ATK	20,118,735.00	
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	13,421,800.00	
6	Biaya belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak	80,981,200.00	
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	10,198,900.00	
8	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor alat kebersihan	46,343,066.00	
9	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik	24,053,200.00	
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	49,600,000.00	
11	Belanja Makan dan Minum Rapat	643,579,500.00	
12	Honorarium Narasumber	61,400,000.00	
13	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,000,000.00	
14	Belanja Jasa Pencucian Pakaiian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	13,980,000.00	
15	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	20,000,000.00	
16	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	62,175,263.00	
17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel (Pemeliharaan Meja Kerja)	1,050,000.00	
18	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	91,721,610.00	
19	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	209,990,863.00	
20	Belanja Modal Alat Pendingin (Kipas Angin)	511,500.00	
21	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	10,155,300.00	
22	Pemeliharaan Aset Takberwujud Jasa konversi aplikasi / sistem informasi, pemeliharaan website / LMS / Jurnal Sipatokkong (Pengembangan Aplikasi / Website) Semester I (Januari-Juni) TA 2023	19,000,000.00	
23	Sewa kendaraan dinas bermotor perorangan (Pajero) bulan November	18,248,500.00	
	Jumlah	2,345,932,192.00	

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

A. Struktur Organisasi SKPD

Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 233 Tlp./Fax No. 0411-876223 Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat disampaikan struktur organisasi Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :



B. Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah.

2. Fungsi

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi yaitu :

- 1) Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia di wilayah provinsi sulawesi selatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintah bidang pengembangan sumber daya manusia, meliputi bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan, bidang pengembangan kompetensi teknis inti, bidang pengembangan kompetensi teknis umum dan fungsional, bidang pengembangan kompetensi manajerial;
- 3) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintah bidang pengembangan sumber daya manusia, meliputi bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan, bidang pengembangan kompetensi teknis inti, bidang pengembangan kompetensi teknis umum dan fungsional, bidang pengembangan kompetensi manajerial;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang pengembangan sumber daya manusia, meliputi bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan, bidang pengembangan kompetensi teknis inti, bidang pengembangan kompetensi teknis umum dan fungsional, bidang pengembangan kompetensi manajerial; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Sumber Daya OPD

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan di dukung oleh SDM yang professional di bidangnya masing-masing, dengan jumlah 119 orang yang terdiri dari :

1. Pejabat Struktural	=	8 orang
• Eselon II	=	1 orang
• Eselon III-a	=	5 orang
• Eselon IV	=	3 orang
2. Sub Koordinator	=	18 orang
Analisis Bangkom	=	5 orang
Analisis SDM	=	3 orang
3. Pejabat Fungsional	=	67 orang
Fungsional Widyaiswara	=	48 orang
Fungsional pustakawan	=	4 orang
Fungsional arsiparis	=	5 orang
Fungsional Analisis Kebijakan	=	2 orang
Fungsional Analisis SDM Aparatur	=	5 orang
Fungsional Dokter	=	1 orang
Fungsional laksana barang	=	2 orang
4. Staf Pelaksana	=	35 orang
- Gol. IV	=	3 orang
- Gol. III	=	24 orang
- Gol. II	=	8 orang
- Gol. I	=	- orang

D. Telaahan Visi dan Misi Kaitan dan Kontribusi Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan Terhadap Pencapaian Visi dan Misi

a. Visi

Berdasarkan pemahaman atas permasalahan/isu strategis pembangunan dan potensil yang dihadapi pada periode 2018-2023, arahan dari RPJPD Sulawesi Selatan, serta arahan dari visi RPJMN 2019-2023, visi pembangunan daerah Sulawesi Selatan 2018-2023 adalah: ***"Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter"***

Dalam rumusan visi ini ada **5 (Lima) pokok visi** yakni **Inovatif** diindikasikan oleh Kondisi Pemerintahan yang memiliki kemampuan men-ciptakan gagasan baru, produk baru dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang "bersih dan melayani", **Produktif** ditandai oleh kondisi perekonomian yang berkemampuan

menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang "mandiri dan sejahtera", **Kompetitif** ditandai oleh kondisi Masyarakat yang memiliki sumber daya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang "sehat dan cerdas, **Inklusif** ditandai oleh kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang "inklusif dan terkoneksi",serta **Berkarakter** ditandai oleh kondisi penyelenggaraan pembangunan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang "berkarakter" .

b. Misi

Misi dalam RPJMD ini dimaksud yaitu :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif;
2. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel;
3. Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif;
4. Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif dan berkarakter;
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.

E. Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan SKPD

Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai 2 Program dan 9 Kegiatan selama Tahun Anggaran 2023 yaitu;

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI

Adapun kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini yang meliputi 7 (tujuh) kegiatan dan terbagi dalam sub kegiatan, yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2023 yaitu :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - (2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - (3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - (4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - (5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - (6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- (2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- (3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- (4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- (5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- (6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
- (7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - (1) Pandataan dan Pengolahan Adinistrasi Kepegawaian
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - (1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - (2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Barang dan jasa dan Belanja Modal)
 - (3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - (4) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - (5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - (1) Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - (2) Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
 - (3) Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - (1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - (2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - (1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - (2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - (3) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud(Belanja Modal)
 - (4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - (5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- (6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Belanja Modal)

II. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Adapun kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini dilaksanakan dalam tahun anggaran 2023 sebanyak 2 (dua) kegiatan dan terbagi dalam sub kegiatan yaitu :

- 1) Pengembangan Kompetensi Teknis
 - (1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan : Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
 - (2) Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan : Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

- 2) Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 - (1) Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
 - (2) Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga
 - (3) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
 - (4) Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan : Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

BAB V PENUTUP

Laporan pertanggungjawaban Keuangan Badan Pengembangan Provinsi Sulawesi Selatan Semester II Tahun Anggaran 2023.

Laporan Realisasi Anggaran :

≪ Realisasi Pendapatan	Rp	1.324.620.200,0
≪ Realisasi Belanja Daerah	Rp	27.528.888.473,00
➢ <i>Belanja Operasi</i>	Rp	27.528.888.473
➢ <i>Belanja Modal</i>	Rp	-

Demikian Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Semester II Tahun Anggaran 2023 ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban pertanggungjawaban Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Jasa.

Makassar, Januari 2024

KEPALA BADAN,



f Prof. Dr. MUHAMMAD JUFRI, M.Si. M.Psi. Psikolog
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. 19680202 199403 1 003